

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA METRO TAHUN 2007-2017
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Hindun Farhany Mawaddah

NPM: 1551010192

Jurusan: Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA METRO TAHUN 2007-2017
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Hindun Farhany Mawaddah

NPM: 1551010192

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I: H. Supaijo, S.H., M.H.

Pembimbing II: Muhammad Iqbal, M.E.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan dan juga untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Dalam Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas, dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. IPM Kota Metro dari tahun 2007-2017 terus mengalami peningkatan, hal ini tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan yang terjadi fluktuasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk *time series* yang bersumber dari BPS Lampung dan Kota Metro dan instansi terkait. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan *library research*. Metode analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji hipotesa (uji R^2 , uji t dan uji F), kemudian pengolahan data menggunakan aplikasi *Eviews*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, hal tersebut dikarenakan terjadinya fluktuasi pada PEK dari tahun 2007-2017 dan Pertumbuhan ekonomi di Kota Metro tidak difokuskan untuk meningkatkan IPM. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, hal tersebut dikarenakan PPSP di Kota Metro difokuskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Metro. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, hal tersebut dikarenakan masih terdapat desa di beberapa kecamatan yang berstatus desa swakarya sehingga kesadaran masyarakat akan kesehatan masih tergolong kurang. Dan berdasarkan hasil uji R^2 diperoleh 0,362512 hal tersebut berarti 36,25% variabel IPM dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam perspektif ekonomi islam, pertumbuhan ekonomi bersifat multidimensi yang tidak hanya mementingkan kesejahteraan di dunia saja akan tetapi mencakup kesejahteraan di dunia dan akhirat. Pendidikan dan kesehatan dalam islam adalah dua hal penting yang saling terkait. Karena melalui pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas manusia disuatu daerah. Peran pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan IPM melalui pembangunan SDM tentunya dimulai dari pendidikan karena sesuai dengan perintah yang Allah turunkan pertama kali yaitu "Bacalah", selain itu pendidikan juga sangatlah penting dalam islam. Dan dalam islam sehat terdiri dari tiga pilar yaitu sehatnya pendengaran, penglihatan dan hati maka dengan begitu manusia dapat mendengar, melihat dan memahami kebenaran dan petunjuk yang dapat digunakan sebagai bekal untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak.

Kata Kunci: Pendidikan, Kesehatan, IPM



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp. 0721-703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN
DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM) DI KOTA METRO TAHUN 2007-2017
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nama : Hindun Farhany M.
NPM : 1551010192
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

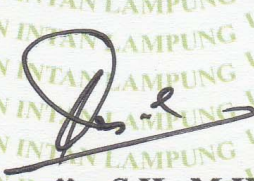
MENYETUJUI

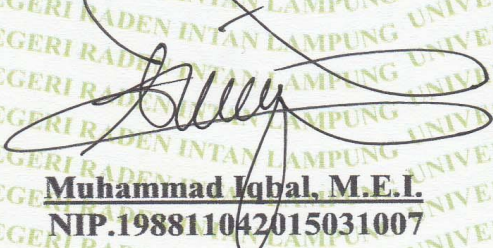
Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2019


Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Supaijo, S.H., M.H.
NIP. 196503121994031002


Muhammad Iqbal, M.E.I.
NIP. 198811042015031007

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah


Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA METRO TAHUN 2007-2017 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** disusun oleh **Hindun Farhany Mawaddah**, NPM: **1551010192**, Jurusan: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : **Madnasir, S. E., M.S.I**

Sekretaris : **Adib Fachri, M. E. Sy**

Penguji I : **Any Eliza, S.E., M. Ak**

Penguji II : **H. Supaijo, S.H., M.H**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

MOTTO

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

Artinya: *“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang Menciptakan.”*
(Q.S Al-Alaq: 1)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Dzat Yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Untuk Umi dan Abi tersayang, terimakasih atas segala ridho, dukungan serta do'a yang senantiasa dipanjatkan dalam sujudmu untuk mengiringi langkah ananda dalam mencapai kesuksesan. Terimakasih sudah menjadi motivasi dan alasan terbesar ananda untuk tetap melangkah dalam kesulitan sekalipun.
2. Adik-adikku tersayang (Aye, Aura dan Asa) yang walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak bisa digantikan. Terimakasih telah mendo'akan, mendukung dan menantikan keberhasilanku. Maaf belum bisa menjadi panutan yang baik seutuhnya, tapi aku akan selalu berusaha agar bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian semua.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku dalam menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis yaitu Hindun Farhany Mawaddah, lahir di Sinar Bandung, pada tanggal 19 agustus 1996, anak pertama dari empat bersaudara. Dari pasangan Bapak Muryanto dan Ibu Turinem. Riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. TK ABA Trimulyo lulus pada tahun 2002
2. SD Negeri 15 Pesawaran lulus pada tahun 2008
3. MTs Al-Muhsin Metro lulus pada tahun 2011
4. MA Al-Muhsin Metro lulus pada tahun 2014

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur UM-PTKIN pada tahun 2015.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA METRO TAHUN 2007-2017 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan nasihat
3. Bapak H. Supaijo, S.H., M.H. selaku Pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktu dan member arahan serta kemudahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Muhammad Iqbal, M.E.I, selaku Pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi masukan berupa saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat.
6. Untuk semua teman-teman ku G15 Fiobetion, terimakasih atas semua kebaikan dan semangat yang kalian tularkan padaku, kalian adalah *Serendipity* bagiku. Dan untuk RM dkk yang telah memberikan semangat melalui lagu-lagu yang memotivasi untuk terus berusaha dan berjuang agar bisa menggapai apa yang diinginkan.
7. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung khususnya kelas C dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

Hindun Farhany M.
1551010192

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori	13
1. Grand Teori Indeks Pembangunan Manusia	13
2. Indeks Pembangunan Manusia	14
a. Definisi Pembangunan Manusia	14
b. Indeks Pembangunan Manusia	17
c. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia	18
3. Pertumbuhan Ekonomi	23
a. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	23
b. Teori Pertumbuhan Ekonomi	25
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	32
d. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	33
4. Pengeluaran Pemerintah	37
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Kerangka Pemikiran	51
D. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	59
B. Jenis dan Sumber Data	60
C. Teknik Pengumpulan Data	61
D. Definisi Operasional Variabel	61
E. Teknik Analisis Data	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A.Deskripsi Objek Penelitian.....	72
B.Gambaran Hasil Penelitian.....	76
C.Analisis Data	80
D.Pembahasan.....	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Tabel Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2004-2014
Tabel 2.1	: Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM
Tabel 4.1	: Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Desa di Kota Metro Tahun 2017
Tabel 4.2	: Indeks Pembanguna Manusia Kota Metro Tahun 2007-2017
Tabel 4.3	: Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro Tahun 2007-2017
Tabel 4.4	: Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kota Metro Tahun 2007-2017
Tabel 4.5	: Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kota Metro Tahun 2007-2017
Tabel 4.6	: Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera
Tabel 4.7	: Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 4.8	: Hasil Uji Autokorelasi
Tabel 4.9	: Uji Heterokedastisitas (Uji <i>White</i>)
Tabel 4.10	: Hasil Analisis Regresi Berganda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 4 : Indeks Pembanguna Manusia Kota Metro Tahun 2007-2017, Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro Tahun 2007-2017, Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kota Metro Tahun 2007-2017, Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kota Metro Tahun 2007-2017
- Lampiran 5 : Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera, Hasil Uji Multikolinearitas, Hasil Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas (Uji *White*), Hasil Analisis Regresi Berganda
- Lampiran 6 : Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Desa di Kota Metro Tahun 2017
- Lampiran 7 : Sumber Anggaran Kesehatan Kota Metro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KOTA METRO TAHUN 2007-2017 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Pengaruh, adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹
2. Pertumbuhan Ekonomi, yakni perubahan jangka panjang melalui kenaikan tabungan dan peningkatan penduduk.²
3. Pengeluaran Pemerintah, adalah pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), h.145.

² Nurul Huda et al, *Ekonomi Pembangunan islam* (Jakarta, Pranada Media Group, 2005), h. 23.

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.⁵
6. Indeks Pembangunan Manusia, adalah suatu konsep yang di perkenalkan pertama kali oleh UNDP dimana konsep ini di gabungkan oleh indeks harapan hidup, pendidikan dan daya hidup.⁶
7. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam kerangka mencari *maisyah* (penghidupan individu maupun kelompok/negara sesuai ajaran Islam) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, yang dimaksud pada judul skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah tentang pertumbuhan ekonomi dalam

³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia, h. 3.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hal. 2.

⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah* (Edisi Revisi) (Jakarta: Rajawali Pers 2016), h.147.

⁷ Hasan Andy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.11.

pandangan islam. Dalam hal ini terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gabungan dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli ini merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas SDM suatu negara.⁸ Dan dalam hal ini penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan di Kota Metro tahun 2007-2017 dalam perspektif islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut:

A. Alasan Objektif

Kota Metro dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan IPM Kota Metro merupakan tertinggi kedua di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung. Selain itu Kota Metro juga memiliki julukan sebagai Kota Pendidikan, yang memiliki cukup banyak instansi pendidikan dan juga salah satu dimensi yang dijadikan dalam tolak ukur penghitungan IPM adalah dari segi kesehatannya, sehingga dalam penelitian ini dimasukkan variabel pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan.

B. Alasan Subjektif

Karena bahasan skripsi ini sesuai dengan yang penulis pelajari di Jurusan Ekonomi Syariah serta didukung oleh tersedianya data baik data

⁸Irfan Syauqi Beik dan LaiLy Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah* edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 147.

primer ataupun sekunder dan tersedianya literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai referensi. Selain itu judul yang diajukan sesuai dengan jurusan yang diambil yaitu jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa, dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran peningkatan kualitas SDM atau pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia adalah proses dalam meningkatkan jumlah SDM yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.⁹

IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

⁹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: PT RajaWali Pers Persada, 2014), h. 414.

Manusia merupakan modal utama dalam membangun suatu negara agar menjadi lebih baik, pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja diukur dari pendapatan domestik bruto, tetapi juga dari harapan hidup dan pendidikan masyarakatnya. Peran pemerintah penting dalam meningkatkan pembangunan manusia, melalui alokasi dana bagi masyarakat yang digunakan untuk peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.¹⁰

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro sejak tahun 2007-2017 terus mengalami peningkatan dan selama rentang waktu tersebut IPM tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 75,87.

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan IPM. Salah satu tugas pembangunan yang terpenting adalah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pembangunan manusia. Pembangunan manusia atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal yang sangat penting, upaya untuk meningkatkan mutu SDM dalam pembangunan telah menjadi suatu kebutuhan. Mutu SDM yang baik disuatu wilayah memiliki peranan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya.

¹⁰ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.278.

Tabel 1.1
Tabel Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi
Lampung Tahun 2004-2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	IPM
2004	5,07	68,40
2005	4,02	68,80
2006	4,98	69,40
2007	5,94	69,89
2008	6,08	70,30
2009	5,26	70,93
2010	5,88	71,42
2011	6,56	71,94
2012	6,44	72,45
2013	5,78	72,87
2014	5,08	73,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2014

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2004-2014. Dapat dilihat bahwa angka Pertumbuhan Ekonomi mengalami fluktuasi, sedangkan IPM terus memperlihatkan tren peningkatan. Hal ini menandakan bahwa tidak selalu dengan adanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi akan juga diikuti oleh peningkatan IPM, yang berarti masih ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi peningkatan IPM.

Pendidikan juga kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi

agregat. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.¹¹

Dalam studi yang dilakukan oleh Lee Jong Hwa mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Republik Korea periode 1946-2002, telah menjelaskan bahwa antara kedua indikator tersebut memiliki hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memberikan pengaruh baik pula bagi pembangunan manusia. Sebaliknya, peningkatan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik dapat menjadikan kinerja perekonomian semakin meningkat.¹²

Keberadaan HDI yang ditawarkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) sebagai salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pembangunan manusia mungkin dapat menjadi indikator yang paling komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi islam, karena teori dan konsep yang mendasari untuk membangun Indeks Pembangunan Manusia tidak didasarkan pada *maqashid* syariah. Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan *Islamic Human*

¹¹ Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat, dan Hanly F.DJ. Siwu, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 15 no. 02(Juli 2015), h. 2.

¹² Lincolyn Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010. (Skripsi Tri Yuniarti Rusandi "Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lampung Utara tahun 2011-2016, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 16.

Development Index (I-HDI) yang mana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif islam.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anto dalam *Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*¹⁴ dan Rafsanjani dalam Analisis I-HDI di Indonesia, I-HDI dihitung berdasarkan data yang secara komprehensif menggambarkan kelima dimensi maqashid syariah. Untuk dimensi agama (*ad-dien*) indikator yang digunakan yaitu data angka kriminalitas dan angka partisipasi siswa sekolah agama. Dimensi jiwa (*an-nafs*) indikator yang dipakai yaitu data angka harapan hidup. Sementara untuk dimensi intelektual (*al-aql*) digunakan data angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk dimensi keturunan (*an-nasl*) digunakan dua indikator yaitu data angka kelahiran total dan angka kematian bayi. Untuk dimensi harta (*al-maal*) maka digunakan gabungan dua indikator yaitu indikator kepemilikan harta oleh individu dan indikator distribusi pendapatan. Dan untuk indikator kepemilikan atas harta, data yang digunakan yaitu pengeluaran per kapita riil disesuaikan, untuk indikator distribusi pendapatan digunakan data indeks gini dan indeks kedalaman kemiskinan.¹⁵

¹³ Maya Masita Septiarini, dan Sri Herianingrum, “Analisis I-HDI (*Islamic Human Development Index*) di Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.4 No. 5(Mei 2017), h. 382.

¹⁴ MB Hendrie Anto, *Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*, *Islamic Economic Stidies*, Vol. 19 No.2 (2009), h. 71.

¹⁵ Maya Masita Septiarini, dan Sri Herianingrum, “Analisis I-HDI (*Islamic Human Development Index*) di Jawa Timur”...., h. 382.

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan keimanan (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasb*) dan kekayaan (*al-maal*). Islam mengajarkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah dalam baik secara ekonomi, agama, ilmu maupun pertahanan.¹⁶ Seperti yang yang disebutkan dalam surat An-Nisa: 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

Artinya: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."* (Q.S An-Nisa: 9)¹⁷

Ayat diatas menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan perlu adanya kejujuran dan meningkatkan taqwa kepada Allah SWT dan membantu masyarakat yang lemah (miskin). Dalam konsep konvensional pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak yang dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis, peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.¹⁸

¹⁶ Chaapra dalam Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami*; Pendekatan Teoritis dan Sejarah, edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), h.1.

¹⁷ Al- Kalam Digital Versi 1.0 (Bandung: Penerbit Diponegoro 2009), h. 78.

¹⁸ Chaapra dalam Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami*...., h. 1.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Metro dalam perspektif ekonomi islam pada tahun 2007-2017. Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Batasan masalah sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam meninterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasanobjek.

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro tahun 2007-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017?

2. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro tahun 2007-2017.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro tahun 2007-2017.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro tahun 2007-2017.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

2.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan atau sebagai literatur yang dapat dijadikan sarana dalam mengkajian tentang IPM bagi para insan akademik yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

Manfaat praktis:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang IPM dan dapat mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang IPM.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, referensi dan pembandingan bagi mahasiswa lain yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama agar bisa lebih baik.
- c. Bagi pemerintah Kota Metro, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih bijak dalam membuat kebijakan pengalokasian dana dan lebih memperhatikan aspek-aspek yang dapat berpengaruh terhadap IPM Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Grand Teori* Indeks Pembangunan Manusia

Dalam UNDP (*United National Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari sudut pertumbuhan ekonominya.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas, dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks berkisar antara 0-100. Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya

pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*dasic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.¹⁹

2. Indeks Pembangunan Manusia

a. Definisi Pembangunan Manusia

Pada dekade 1990-an, definisi pembangunan telah semakin berkembang dengan didukung oleh pembangunan manusia (*human development*) sehingga terbentuk definisi pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*).²⁰ Definisi pembangunan yang berorientasi pada manusia disebut dengan paradigma pembangunan manusia.²¹ Mengutip isi *Human Development*

¹⁹ *Human Development Report, United National Development Programme (UNDP)*, New York Oxford University Press (1995), h. 103.

²⁰ Maya Masita Septiarini, dan Sri Herianingrum, “Analisis I-HDI (*Islamic Human Development Index*) di Jawa Timur”..., h. 383.

²¹ Mega Castrenaningtyas, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur; studi kasus Kawasan Gerbang Kertosusila dan Wilayah Tapal Kuda, Skripsi, Program Sarjana Departement Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h. 19.

Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.²² Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka maju-mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh tingkat sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor dominan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA).²³

Secara khusus, indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan daya yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.²⁴

Islam memandang bahwa manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai '*abdullah* (hamba Allah) dan *Khalifatullah fil ard* yaitu wakil

²² Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro (On line) tersedia di: <https://metrokota.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1> (2019)

²³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.25.

²⁴ Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2010, *Katalog Badan Pusat Statistik*, h.5.

Allah di muka bumi yang tugas untuk memakmurkan.²⁵ Manusia merupakan unsur penting di bumi ini. Manusia diciptakan Allah SWT adalah sebagai *khalifah* (pemimpin) di muka bumi, oleh sebab itu maka manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin.

Pembangunan manusia lebih lanjut menuntut seseorang untuk berperilaku baik (*akhlaqul karimah*). Standar moral suatu perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Moralitas islam tidak diposisikan sebagai suatu batas ilmu ekonomi, namun justru dijadikan sebagai patokan dalam menyusun ekonomi islam.²⁶

Dalam buku Falsafah At Tarbiyyah, Omar M Al-Tauny mengungkapkan bahwa tujuan asasi pendidikan dalam islam salah satunya adalah untuk membantu pembentukan moral yang baik.²⁷

Dalam firman-Nya Q.S Al-Mujadillah ayat 11 menjelaskan:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Mujadillah: 11).²⁸

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat.

²⁵ Irfan Syauqi Beik dan laily Dwi Arsyinta, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*..., h. 15.

²⁶ P3EI Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 33.

²⁷ Irfan Syauqi Beik dan laily Dwi Arsyinta, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*..., h. 150.

²⁸ Al- Kalam Digital Versi 1.0..., h. 543.

Ayat tersebut menjelaskan tentang arti pentingnya manusia yang memiliki kualitas dan mutu sehingga Allah SWT akan mengangkat dan memberikan derajat yang tinggi.

Tujuan pembangunan manusia pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi manusia. Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama bagi islam, dan juga merupakan tujuan ekonomi islam sekaligus pembangunan syari'ah.²⁹

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karen terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per

²⁹ P3EI Yogyakarta, *Ekonomi Islam*..., h. 54.

kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.³⁰ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu Negara.³¹

c. **Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia**

Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Indeks pembangunan Manusia terdiri dari beberapa komponen dasar diantaranya yaitu:

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Pada komponen angka usia harapan hidup angka tertinggi sebagai batas penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun dan angka ini diambil dari standar UNDP.

³⁰Katalog Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2010...., h.5.

³¹Irfan Syauqi Beik dan laily Dwi Arsyinta, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*...., h.147.

2) Tingkat Pendidikan

IPM dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan SDM, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.³²

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas

³² Seokidjo Notoatmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 16.

maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.³³

3) Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan. Perhitungan indeks daya beli dilakukan sebesar 27 komoditas kebutuhan pokok. Batas maksimum dan minimum perhitungan daya beli digunakan seperti yang ada pada tabel 4 di bawah. Batas maksimum daya beli adalah Rp. 730.720,-, sementara sampai dengan tahun 1996 batas minimum adalah Rp. 300.000,-. pada tahun 2002 dengan mengikuti kondisi pasca krisis ekonomi batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp. 360.000,-. Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas minimum dan maksimum seperti terlihat dalam Table 2.1

Tabel 2.1
Nilai Maksimum Minimum dari setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf(Persen)	100	0	Standar UNDP

³³Katalog Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2010....., h.5-7.

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	Standar UNDP
Daya Beli(Rupiah PPP) Konsumsi per kapita yang disesuaikan	732.720	300.000(1996) 360.000(2002)	Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro 2019

PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Sensus Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).³⁴ Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{\sum_i Indeks(i, j)}$$

Dimana :

Indeks X(i,j) : indeks komponen IPM ke I untuk wilayah j

I : 1,2,3

J : 1,2,,,ke wilayah

Hasil penghitungan IPM akan memberikan gambaran seberapa jauh suatu wilayah telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tingkat pengeluaran konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak semakin dekat terhadap sasaran yang dicapai.

UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah kedalam empat golongan yaitu rendah jika IPM kurang dari 50, sedang atau menengah dibedakan menjadi dua yaitu: menengah bawah

³⁴Katalog Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2010....., h.32.

bila $50 \leq IPM < 60$ dan menengah atas jika $66 \leq IPM \leq 80$, serta tinggi jika IPM lebih dari 80. Pengukuran tingkat kemajuan pencapaian terhadap sasaran ideal IPM dihitung setiap tahun dalam suatu periode disebut reduksi *Short Fall* per tahun.

Perhitungannya adalah dengan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{IPMtI - IPMt0}{IPMref - IPMt0} \times 100 \right)^{1/t}$$

Dimana :

IPMt0 = IPM tahun dasar

IPMti = IPM tahun terakhir

IPMref = IPM acuan atau idela yang dalam hal ini sama dengan 100

Ada empat reduksi *short fall* yaitu, sangat lambat jika reduksi *short fall* < 1,3, lambat jika reduksi *short fall* 1,3-1,5 : menengah jika reduksi *short fall* 1,5 - 1,7 dan cepat jika reduksi *short fall* > 1,7. Semakin besar reduksi *short fall* pertahun maka semakin besar kemajuan pembangunan manusia yang dicapai daerah tersebut dalam periode itu.³⁵

Sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT jauh sebelum manusia diciptakan yang kemudian diberikan kebebasan yang terbatas kepada manusia untuk memanfaatkannya sesuai dengan kemampuan akal yang terdapat dalam diri manusia tersebut. Allah menciptakan manusia

³⁵Katalog Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010....,h. 7-12.

sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengelola sumber daya alam yang ada menggunakan akal yang juga diberikan oleh Allah SWT.³⁶

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output per kapita yang menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup.³⁷ Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara.³⁸ Ada beberapa definisi mengenai pertumbuhan ekonomi:

- 1) Menurut Barimbang, pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang, karena masalah utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dinikmati masyarakat sampai lapisan bawah.³⁹
- 2) Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan

³⁶ Febri Aquariansyah, "Analisis Pengaruh Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 34.

³⁷ Paul A Samuelson dan William, dkk, *Makroekonomi* Edisi 14, (Erlangga, 1992), h. 257.

³⁸ Novita Dewi, "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau". *Jom Fekon*, Vol. 4 No. 1 (Februari 2017), h. 871.

³⁹ Diah Pradnyadewi T, Ida Bagus Putu Purbadharmaja, "Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali". *Jurnal Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 2 (2 Februari 2017), h. 4.

barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran bertingkat.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai definisi pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dampaknya sangat berpengaruh terhadap masyarakat kecil maupun besar, naik turunnya pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sejahtera.⁴¹

Pertumbuhan ekonomi tercermin dari besarnya persentase kenaikan atau penurunan PDRB atas dasar harga konstan terhadap PDRB atas dasar harga konstan ditahun sebelumnya. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh perubahan tingkat harga barang dan jasa. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi wilayah menggambarkan tingkat perkembangan riil atau perkembangan volume produksi barang dan jasa di wilayah bersangkutan.⁴²

⁴⁰ Adriyan Sutawijaya, "Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006". *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 6 No. 1(Maret 2010), h. 15.

⁴¹ Tri Yuniarti Rusandi, "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016". (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung 2014), h. 41.

⁴²Badan Pusat Statistik, *Tinjauan Ekonomi Regional Daerah Otonom di Provinsi Lampung 2014*, h. 10.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Karena ilmu pengetahuan terus berkembang dari masa ke masa, berikut beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang menonjol diantaranya adalah:

1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke -18 dan permulaan abad ke-19, yaitu pada masa revolusi industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan.

Kemajuan teknologi mula-mula disebabkan oleh adanya akumulasi kapital atau dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan kapital. Dengan adanya akumulasi kapital akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja melalui mekanisasi yang lebih baik sehingga produktivitas tenaga kerja dapat bertambah. Kecepatan pembentukan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan. Sedangkan tingkat keuntungan ini akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang

(*law of diminishing returns*), karena sumber daya alam itu terbatas adanya.⁴³

Menurut pandangan Smith mengenai corak proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi, dan yang belakangan ini akan menimbulkan kenaikan produktivitas. Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk dari masa ke masa, yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan dalam pendapatan nasional akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. Tambahan pula, spesialisasi yang bertambah tinggi dan pasar yang bertambah luas akan menciptakan teknologi dan mengadakan inovasi. Maka, perkembangan ekonomi akan berlangsung lagi dan dengan demikian dari masa ke masa pendapatan per kapita akan terus bertambah tinggi.⁴⁴ Menurut Ricardo, pola proses pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) Pada permulaanya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam relatif cukup banyak. Sebagai akibatnya, para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karenan pembentukan

⁴³ Irawan, M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* edisi keenam (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 21.

⁴⁴ Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah dan Dasar Kebijakan* (ed. 2) cetakan ke-8 (2017), h. 245.

modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi akan menciptakan tingkat pembentukan modal yang tinggi pula. Ini akan mengakibatkan kenaikan produksi dan penambahan permintaan tenaga kerja.

- b) Sesudah tahap tersebut, karena jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah ini mendorong pertumbuhan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan adalah tanah yang mutunya lebih rendah. Sebagai akibatnya, hasil tambahan yang diciptakan oleh seorang pekerja (produk marginalnya) akan menjadi semakin kecil, karena lebih banyak pekerja digunakan. Dengan demikian, dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang terus menerus, sewa tanah makin lama makin merupakan bagian yang cukup besar dari seluruh pendapatan nasional dan mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Dorongan untuk mengadakan pembentukan modal menurun dan selanjutnya akan menurunkan permintaan atas tenaga kerja.
- c) Sesudah tahap tersebut, tingkat upah akan menurun dan pada akhirnya akan berada pada tingkat yang minimal. Pada tingkat ini perekonomian akan mencapai *stationary state*. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa

tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

Menurut Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Dengan demikian tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara saja sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semain berkurang karena pendapatan buruh juga semain berkurang.

Jadi kenaikan jumlah penduduk saja bukan merupakan pendorong kemajuan ekonomi bilamana ia tidak membawa kenaikan permintaan efektif. Lagi pula perkembangan penduduk, walaupun juga menambah permintaan efektif, belum tentu membawa perkembangan ekonomi.

Menurut Malthus, untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus. Tabungan sangat perlu demi pembentukan kapital, kapital harus diinvestasikan dan investasi tersebut baru diadakan

setelah ada permintaan untuk investasi. Permintaan akan investasi akan ada bila terdapat kenaikan jumlah permintaan. Jadi menurut Malthus adanya perkembangan ekonomi atau kenaikan produksi dapat diharapkan bila ada tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang berakibat menekan jumlah upah dan di samping itu juga karena pendapatan yang diterima ada yang ditabung dan tidak dikonsumsi semuanya. Oleh karena itu Malthus merasa pesimis terhadap perkembangan ekonomi.⁴⁵

2) Teori Pertumbuhan Neoklasik

Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan Neoklasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi kepada kemungkinan menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dan menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut mendapat perhatian orang setelah Abramovits pada tahun 1956 dan Solow pada tahun 1957, menunjukkan bahwa antara 80 sampai 90 persen pertambahan pendapatan perkapita dalam perekonomian Amerika Serikat dalam satu abad yaitu dari pertengahan abad ke-19 hingga

⁴⁵ Irawan, M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan....*, h.27-28.

pertengahan abad ke-20, bukan bersumber dari kenaikan stok modal. Kemajuan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi dan perbaikan kemampuan tenaga kerja. Kenyataan ini merupakan bantahan terhadap keyakinan dalam teori pertumbuhan sejak masa Klasik yang menganggap bahwa pembentukan modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi.⁴⁶

Aliran Neoklasik mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan saat yang akan datang. Menurut Neoklasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu, tingkat bunga juga menentukan tingginya tingkat investasi. Jika tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi dan sebaliknya. Kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan kenaikan teknologi menurut Neoklasik adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh atau relatif lebih bersifat “penghematan buruh” (*labour saving*) daripada “penghematan kapital” (*capital saving*). Jadi kemajuan teknik akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang-barang kapital.⁴⁷

⁴⁶ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah dan Dasar Kebijakan...*, h. 269.

⁴⁷ Irawan, M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan...*, h. 37

3) Teori Schumpeter

Menurut Joseph Schumpeter perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus (*discontinuous*), yaitu merupakan gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang telah ada. Perubahan yang spontan dan terputus-putus dalam saluran perdagangan dan gangguan-gangguan dalam keseimbangan itu tampak dalam kehidupan industri dan perdagangan, dan bukannya tampak dalam permintaan konsumen dan barang-barang akhir. Perubahan-perubahan dalam selera konsumen memang ada tetapi perubahan-perubahan itu bersifat gradual atau sedikit demi sedikit. Jadi perkembangan ekonomi disebabkan oleh adanya perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan.

Berproduksi berarti mengkombinasikan bahan-bahan dan tenaga yang ada atau yang dapat dicapai, menghasilkan barang lain atau barang yang sama tetapi dengan cara atau metode yang lain. Jika kombinasi-kombinasi yang baru timbulnya tidak terus menerus tetapi terputus-putus, maka gejala inilah yang menumbuhkan adanya perkembangan. Kombinasi-kombinasi yang baru ini dilaksanakan oleh wiraswasta (*entrepreneur*). Mereka adalah inovator yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru faktor

produksi. Yang diartikan dengan inovasi dapat berbentuk lima hal yaitu:

- a) Mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru, atau barang-barang yang berkualitas baru yang belum dikenal oleh konsumen.
- b) Mengenalkan suatu metode produksi yang baru.
- c) Pembukaan pasar baru bagi perusahaan.
- d) Penemuan sumber-sumber ekonomi baru.
- e) Menjalankan organisasi baru dalam industri.

Jadi, inovasi adalah tiap perubahan dalam fungsi produksi yang akan membawa kenaikan hasil produksi. Fungsi wiraswasta menunjukkan sifat yang dinamis dan tidak tetap.⁴⁸

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Cepat lambatnya proses pembangunan itu tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

⁴⁸Irawan, M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*...., h. 43.

2) Sumber Daya alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunanya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

3) Ilmu Pengetahuan dan teknologi

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat dapat mendorong proses pembangunan akan tetapi, hal tersebut dapat juga menjadi penghambat pembangunan.

4) Faktor Budaya

Faktor Budaya mempunyai suatu fungsi sebagai pendorong proses pembangunan tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi pembangunan.

5) Sumber Daya modal

Sumber Daya modal dibutuhkan dibutuhkan manusia untuk memperoleh dan mengola sumber daya alam (SDA) dan dapat meningkatkan kualitas IPM.

d. Pertumbuhan dan pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar

yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.⁴⁹ Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan. Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, pilitik dan budaya. Dalam pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia.⁵⁰

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara

⁴⁹ Abdul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam* (Malaysia: Pelanduk Pulication, 1991), h. 5-6.

⁵⁰ Alvi, Safiq A., dan Amer Al-Raubaie, "Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan dalam Persepsi Islam" *Islamia* II, no. 5 (2005), h.90.

keseluruhan. Khurshid Ahmad merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran islam sebagai dasar-dasar filosofis pembangunan yang islami,⁵¹ dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.

Allah SWT berfirman dalam surah Al- Kahfi ayat 38:

كَيْتَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ

Artinya: “Tetapi aku (percaya bahwa), Dia-lah Allah, Tuhan-ku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhan-ku dengan sesuatu pun.”⁵²

- 2) *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan islam.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an surah Az-Zumar ayat 62, sebagai berikut:

اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ

Artinnya: “Allah adalah Pencipta segala sesuatu.”⁵³

- 3) *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahirlah pengertian tentang perwalian, moral, politik, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.

⁵¹ Khurshid Ahmad, “Economic Development in an Islamic Framework” dalam *Studies Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), h. 178-179.

⁵² Al- Kalam Digital..., h. 298

⁵³ *Ibid*..., h. 465.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah (di bumi).”⁵⁴

4) *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Selanjutnya Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep *tazkiyah*, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari *takiyah* adalah falah yaitu sukses dunia maupun di akhirat.⁵⁵

Dalam islam sangatlah dianjurkan bagi umatnya untuk berusaha dan bekerja keras, sehingga Allah akan memberikan balasan yang setimpal dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۙ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka

⁵⁴ Ibid..., h. 6.

⁵⁵ Khurshid Ahmad, “Economic Development in an Islamic Framework”..., h. 178-179.

pasti akan Kami Berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami Beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁵⁶

4. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang relatif penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (utamanya mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan). Rasionalitas dari peran pengeluaran pemerintah (terutama pengeluaran untuk fasilitas publik: sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, irigasi dan lain-lain) terhadap tingkat kesejahteraan tidak diragukan lagi. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat lebih berdaya dalam melakukan kegiatan yang produktif. Pengeluaran untuk sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat menjadi bekal dalam kegiatan pembangunan ekonomi sehingga dapat lebih produktif dan berdaya saing dan pada gilirannya diharapkan memiliki kemampuan ekonomi yang mapan dan stabil.⁵⁷

Menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan

⁵⁶ Al- Kalam Digital..., h. 278

⁵⁷ Rina Sukarman, Taufik Marwa, Tajuddin Husin, “Belanja Pemerintah dan Kemiskinan”. *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol. 10 No. 1 (April 2016), h. 63.

penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Terdapat beberapa teori tentang Pengeluaran Pemerintah, diantaranya adalah :

a. Teori Wagner

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurutya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.

b. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara.⁵⁸

Sedangkan pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat diklasifikasikan dalam dua klasifikasi utama:

⁵⁸Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat, dan Hanly F.DJ. Siwu, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 15 No. 02 (Edisi Juli 2015), h. 3.

1) Pelayanan Kebutuhan Dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

a.) Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi semua masyarakat yang dilindungi Undang-undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.⁵⁹

⁵⁹ Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K., "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Diamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2011), h. 28.

Dalam islam konsep sehat yaitu mencakup tiga pilar, seperti firman Allah dalam surah As Sajdah ayat 9, sebagai berikut:

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

Artinya: *“Dan Dia Menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu.”*⁶⁰

Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati tujuannya adalah agar manusia dapat mendengar, melihat dan memahami kebenaran dan petunjuk. Karena sejatinya saat manusia dilahirkan ke dunia mereka tidak mengerti apa-apa dan dengan pendengaran, penglihatan dan hati yang sehat maka manusia dapat memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bekal hidupnya di dunia dan akhirat kelak.

b.) Pendidikan Dasar

Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen

⁶⁰ Al- Kalam Digital..., h. 415.

UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran.⁶¹

Sehingga investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan, karenanya pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada penduduk secara merata. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi dibidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.⁶²

⁶¹ Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K., “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah”....., h. 28.

⁶² Meier, dalam Winarti, A, *Analisis Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (2014), h. 41.

Pendidikan dalam islam sangatlah penting dan Allah telah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Mujadillah ayat 11 sebagai berikut:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»

Artinya: “...Allah akan Mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”⁶³

Selain itu, perintah pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk membaca dengan kata lain adalah belajar. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al- Alaq ayat 1, sebagai berikut:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang Menciptakan.*”⁶⁴

c.) Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kebutuhan pokok masyarakat meliputi beras, minyak goreng, minyak tanah, gula pasir, telur, daging, dan sebagainya. Dalam hal penyediaan bahan kebutuhan pokok, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediaannya di pasar maupun gudang dalam bentuk cadangan atau persediaan. Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali bisa menimbulkan inflasi yang tinggi (hiperinflasi) dan dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Selain menjaga stabilitas

⁶³ Al- Kalam Digital..., h. 543.

⁶⁴ Ibid..., h. 597.

harga-harga umum, pemerintah juga perlu menjamin bahwa cadangan persediaan di gudang pemerintah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai jangka waktu tertentu untuk menghindari terjadinya kepanikan masyarakat terhadap kelangkaan bahan kebutuhan pokok tersebut.

2) Pelayanan Umum

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang meliputi pelayanan administratif (yaitu pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan publik), pelayanan barang (yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik), dan pelayanan jasa (yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik).

Adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang publik. Teori *public finance* Musgrave mengungkapkan bahwa tidak seluruhnya semua masalah ekonomi diselesaikan oleh mekanisme pasar seperti halnya dengan *social goods*. *Social goods* yang dimaksud terkait dengan eksternalitas, distribusi pendapatan, masalah-masalah ekonomi lainnya (pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain). Dalam hal tersebut mekanisme pasar gagal menyelesaikannya (*market failure*). Pasar pada hakekatnya adalah wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu, untuk mencari keuntungan individual. Oleh karena itu,

aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat kolektif publik dan atau aktivitas tidak bermotif keuntungan tidak bisa diselenggarakan oleh pasar. Karena adanya kegagalan pasar dan dalam kaitannya dengan ketiga peran pemerintah sebagai peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilitasi, maka kewajiban publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang tidak disentuh oleh pasar, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya.⁶⁵

Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran.⁶⁶ Melihat fenomena di atas, pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya

⁶⁵ Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K., “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Diamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1(Juli 2011), h. 28.

⁶⁶ Suryanto dalam Fhina Andrea Christy at al, “ Hubungan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia”, *The 3rd National Conference UKWMS*, Surabaya (10 Oktober 2009), h. 3.

manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya.⁶⁷

Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, peran pemerintah dalam Islam salah satunya adalah mengelola keuangan publik agar diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara bagi kepentingan umat. Yaitu untuk menggunakan keuangan tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketaqwaan masyarakat. Jadi, sebagian besar anggaran pemerintah akan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim.

Al-Qur'an telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang diantara berbagai lapisan masyarakat. Demikianlah, bukan mengakumulasikan kekayaan, namun islam menganjurkan untuk lebih banyak melakukan pengeluaran. Dalam Al-Qur'an dikatakan;

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١٩١ ﴾

Artinya:Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang

⁶⁷ Denni Sulistio Mirza, “Pengaruh Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 1 (November 2012), h. 4.

*diperlukan).” Demikianlah Allah Menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.*⁶⁸ (Q.S Al-Baqarah: 219)

Ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk karena dengan kekayaan yang tidak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat. Di samping itu membagi-bagi harta benda dalam hukum waris Islam dan pelaksanaan zakat merupakan prinsip pokok yang merasionalisasi sistem perekonomian Islam. Sesungguhnya, seluruh filsafat ekonomi tentang tambahan pengeluaran negara adalah membawa surplus kekayaan ke dalam peredaran, dan untuk menjamin distribusi kekayaan berimbang di kalangan semua masyarakat. Hal ini terutama di kalangan fakir miskin, sesuai dengan hak-hak alami serta harta benda pribadi. Tentu saja sistem perpajakan dalam negara Islam harus dikendalikan oleh prinsip kebijakan dan pemeliharaan untuk si miskin.

Berdasarkan sumber-sumber penerimaan anggaran tersebut, maka dapat disalurkan untuk pembelanjaan negara, yang kesemuanya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Distribusi *ghanimah* telah diarahkan pada penjelasan Allah SWT dalam surat 8:41. Sementara distribusi sumber pendapatan zakat dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah: 60. Sedangkan penerimaan dari sumber *fai'* didistribusikan untuk kepentingan (a) memelihara kehidupan

⁶⁸ Al- Kalam Digital..., h. 34.

sosial masyarakat menghadapi seragan kekerasan, baik dari dalam maupun dari luar negeri (b) mengembangkan kualitas kehidupan sosial.

Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kemudian kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain, menurut Ibnu Taimiyah, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintahan lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, harus dibiayai dari anggaran pemerintah *fai*'.
- b) Memelihara keadilan. Negara harus mengurus hakim atau *qadi*.
- c) Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya.
- d) Utilitas umum, infrastruktur dan gugus tugas ekonomi, harus ditanggung negara.⁶⁹

B. Penelitian-penelitian Terdahulu

Merang Kahang dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur” menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kutai Timur. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh

⁶⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 182.

negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.⁷⁰

Dalam penelitian serupa yang dilakukan oleh Meylina Astri, Sri Indah Nikensari dan Harya Kuncara W. yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia” menyatakan jika tingkat pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan maka akan diikuti oleh perubahan IPM. Akan tetapi pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM, hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan di Indonesia hanya berkisar 1% dari PDB. Tetapi, tingkat pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM meskipun dengan tingkat pengaruh yang rendah.⁷¹

Al-Asy Ari Adnan Hakim dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)” memberikan kesimpulan dari penelitiannya bahwa, ditemukan adanya

⁷⁰ Merang Kahang et all, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol.18 (2), h.10.

⁷¹ Sri Indah Nikensari et all, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan dan Bisnis*, Vol.1, No.1, h. 23.

pengaruh negatif tidak signifikan antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara OKI . Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya beberapa permasalahan, yaitu sistem pendidikan dan sistem kesehatan yang masih buruk dikarenakan tingginya angka korupsi, belum terealisasinya program pendidikan dan program kesehatan secara menyeluruh dan tepat sasaran, serta masih besarnya ketimpangan yang terjadi dalam pengalokasian anggaran pemerintah terhadap masyarakat.⁷²

Intan Safitri dalam “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur terhadap IPM di Provinsi Aceh” hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh akan tetapi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh.⁷³

Sal Diba Susan Pake dkk dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Kabupaten Halmahera Utara” hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM dan Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan

⁷² Al-Asy Ari Adnan Hakimet all, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)”. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.1, h. 89.

⁷³ Intan Safitri, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No.1 (Agustus 2016), h. 66.

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Halmahera Utara.⁷⁴

Stephen G.Grubaugh dalam “Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan dalam Pembangunan Manusia” menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan menggunakan pengukuran standar PDB per kapita, dan satu-satunya variabel independen yang ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia adalah populasi, pertumbuhan penduduk, dan tingkat awal GDP.⁷⁵

Asmita, Fitrawaty, Dede Ruslan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatra Utara” hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, persentase orang miskin tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dan terakhir ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.⁷⁶

⁷⁴ Sal Diba Susen Pake dkk, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM di Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18, no. 04 (2018), h. 13.

⁷⁵ Stephen G.Brubaugh, “Economic Growth and Growth In Human Development”, *Applied Econometrics and International Development*, Vol.15-2, h.5.

⁷⁶ Asmita et al, “Analysis of Factor affecting the Human Development Index in North Sumatra Province”. *Journal of Business and Management*, Vol.19, Issue.10, Ver.VII, h. 27.

Denni Sulistio Mirza, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009” menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM.⁷⁷

Yang membuat skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang dilakukan di Kota Metro, yang mana Kota Metro merupakan salah satu dari dua kota yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian variabel bebas yang mempengaruhi IPM, jika dalam penelitian-penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan terhadap IPM maka dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel bebas untuk menentukan pengaruhnya terhadap IPM, variabel tersebut adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan. Penulis juga mencantumkan “perspektif ekonomi islam” dalam penelitiannya, sehingga penelitian ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang konvensional akan tetapi dilihat secara perspektif Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang besar dapat dimanfaatkan sebagai modal bagi pembangunan, namun jumlah penduduk yang besar

⁷⁷ Denni Sulistio Mirza, “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 (1), h. 1.

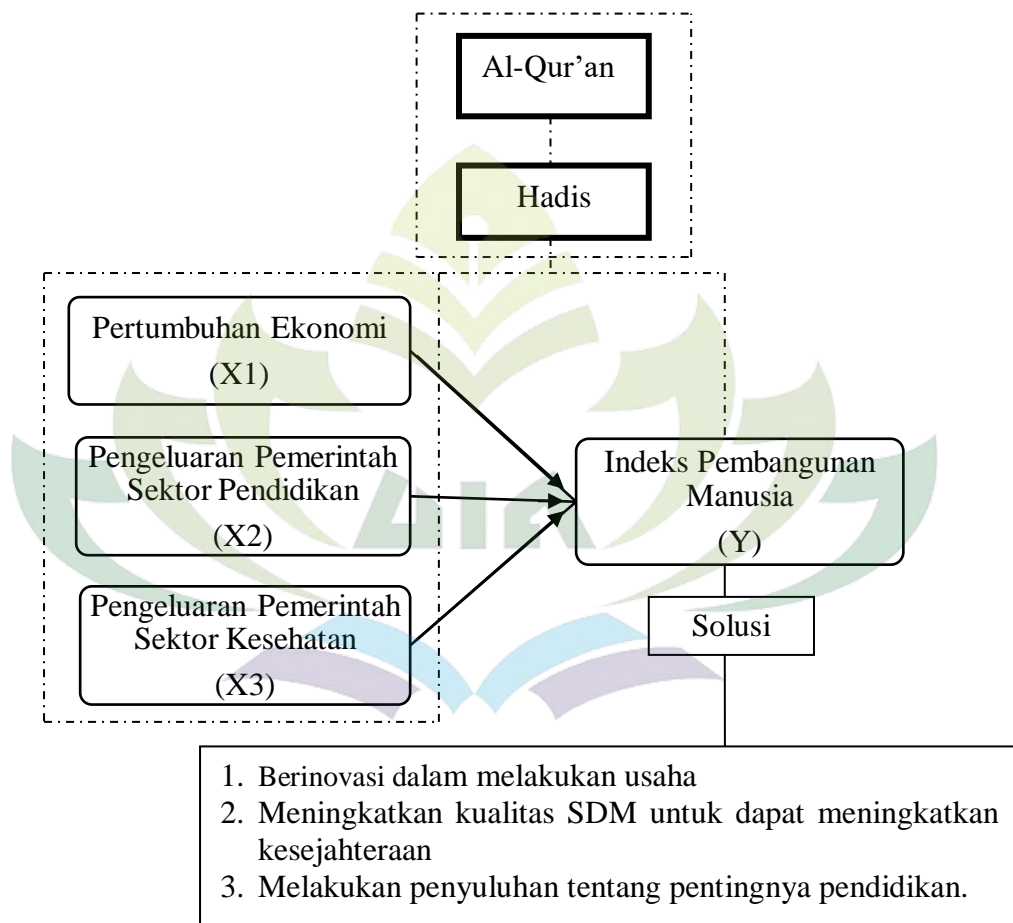
apabila tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran belanja pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan akan mengakibatkan permasalahan pada daerah tersebut, tidak terjadinya peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk itu diperlukannya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, kesehatan dan pendidikan berkaitan sangat erat dengan membangun ekonomi .di satu sisi, modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian investasi yang di curahkan untuk pendidik, karena kesehatan faktor penting agar seseorang bisa hadir kesekolah dalam proses pembelajaran formal seorang anak. Harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan: sementara kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi modal pendidik. Di sisi lain modal pendidik yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan.⁷⁸

Pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk suatu daerah. Dalam penelitian terdahulu, beberapa peneliti mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Akan tetapi terdapat peneliti yang juga mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan

⁷⁸Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2011, *Pembangunan Ekonmi*, (Jakarta), h. 406-407.

manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memperhatikan pada kedua sektor tersebut.

Atas dasar dari penjelasan sebelumnya, maka pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap indeks pembangunan manusia dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Keterangan:

—————→ : Pengaruh secara parsial

- - - - -→ : Pengaruh secara simultan

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

D. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah keterangan sementara dari fakta yang diamati.⁷⁹

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian.⁸⁰ Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara.⁸¹ Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik ditingkat nasional maupun regional (daerah).

Menurut Cliff Laisina et all, menyatakan bahwa pembangunna sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat

⁷⁹ Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 29.

⁸⁰ Hartono, *Metodelogi Penelitian* (Pekanbaru: Zanava Publishing, 2010), h. 27.

⁸¹ Novita Dewi, "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau"....., h. 871.

pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabiitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.⁸²

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmita dkk, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.⁸³

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₀₁ : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

H_{a1} : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori Wagner menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurutya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama

⁸² Cliff Laisina, Vecky Masinambow, Wensy Rompas, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013....., h. 197.

⁸³ Asmita et all, "Analysis of Factor affecting the Human Development Index in North Sumatra Province....., h. 27.

karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.⁸⁴

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran.⁸⁵

Dalam penelitian Sri Indah N., pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, dimana setiap terjadi kenaikan pada pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan maka akan diikuti oleh perubahan indeks pembangunan manusia.⁸⁶

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

⁸⁴ Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat, dan Hanly F.DJ. Siwu, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara”....., h. 3.

⁸⁵ Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K., “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah”....., h. 28.

⁸⁶ Sri Indah Nikensari et all, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia....., h. 23.

H₀₂ : Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_{a2} : Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

3. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi semua masyarakat yang dilindungi Undang-undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.⁸⁷

⁸⁷ Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K., “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah.....”, h. 28.

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU. No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.⁸⁸

Asmita, Fitrawaty, Dede Ruslan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatra Utara” hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.⁸⁹ Yang berarti setiap terjadi peningkatan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan maka akan diikuti oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₀₃ : Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

H_{a3} : Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

⁸⁸ Maria Johanna, “Analisis Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Pembangunan Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, h. 24-25.

⁸⁹ Asmita et al, “Analysis of Factor affecting the Human Development Index in North Sumatra Province.....”, h. 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode baru, dan disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.⁹⁰ Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan dan data Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Lybrary Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, dokumen yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat di seluruh bahan cetakan, sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh orang lain, maupun hasil laporan penelitian terdahulu mengenai pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia.⁹¹

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.7.

⁹¹ Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.45.

2. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif (hubungan) , yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas yaitu belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.⁹² Sehingga dapat memberikan gambaran tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Metro.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series*. Data *time series* adalah data yang memiliki runtun waktu lebih dari satu tahun pada satu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu objek. Dalam penelitian ini data *time series* yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Kota Metro yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Kota Metro, dan instansi terkait lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁹² V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Cetakan Pertama*(Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2015), h.16.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan dua tahap. Tahap pertama dengan mengumpulkan jurnal dan artikel yang telah di publikasikan. Tahap kedua yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan guna analisa penelitian. Sumber data yang dikumpulkan melalui data BPS Kota Metro dan BPS Provinsi Lampung, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti media cetak, publikasi dinas terkait dan lain-lain. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan cara mencatat, mengcopy, mendownload sumber data yang berasal dari *website* yang berkaitan.

D. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel penelitian yang akan dituju. Menurut Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*construct*) atau sifat yang akan dipelajari.⁹³ Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *constructs* yang lebih baik.

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terikat), variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*,

⁹³ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa untuk Melakukan Riset dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*, cetakan kedua (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 233.

antecedent.⁹⁴ Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara.⁹⁵ Indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus:

$$R(t-1, t) = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

R : tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen (%)

PDB : PDB (Pendapatan nasional riil) pada tahun t

PDB_{t-1} : PDB (Pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya.

- b. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dalam amanat amandemen

⁹⁴ Suharmis Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 39.

⁹⁵ Novita Dewi, “Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”....., h. 871.

UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran.

- c. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi semua masyarakat yang dilindungi Undang-undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.⁹⁶

Anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.⁹⁷

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel bebas yang terikat yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks

⁹⁶ Adi Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K., “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah....., h. 28.

⁹⁷ Maria Johanna, “Analisis Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”....., h. 24-25.

Pembangunan Manusia adalah indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Data indeks pembangunan manusia yang akan diteliti adalah data yang diambil dari BPS Kota Metro ataupun BPS Provinsi Lampung dalam bentuk persen. IPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100\%$$

E. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka selanjutnya yaitu menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa penulis menggunakan metode deduktif yakni berasal dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus.⁹⁸ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Analisis yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menaalisis pengaruh antar variabel. Penggunaan analisis deskriptif ini

⁹⁸ Sutrisni Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 42.

ditujukan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Alat Analisis

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi.⁹⁹ Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang sering dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa cara untuk menguji normalitas distribusi data, salah satunya menggunakan statistik Jarque-Bera. Statistik Jarque-Bera (JB) adalah salah satu metode untuk menguji normalitas univariat dan multivariat. Statistik Jarque-Bera mengikuti distribusi chi-kuadrat dengan derajat bebas dua untuk ukuran sampel besar.

⁹⁹Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis* cetakan pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 57.

Hipotesis nol diterima jika hasil uji Jarque-Bera lebih kecil dari nilai chi-kuadrat pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka hipotesis nol diterima yang berarti data berdistribusi normal dan jika sebaliknya maka data tidak berdistribusi normal.¹⁰⁰

2) Multikolinearitas

Multikolinearitas atau kolinearitas ganda (*multicollinearity*) adalah adanya hubungan linear antara peubah bebas X dalam model regresi berganda. Jika hubungan linear antar peubah bebas X dalam model regresi berganda adalah korelasi sempurna maka peubah-peubah tersebut berkolinearitas ganda sempurna.¹⁰¹ Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolinearitas (multiko) pada model regresi tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah koefisien korelasi antar variabel independen haruslah di bawah 0,05.¹⁰²

Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai yang ada di kolom VIF *Centered* dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF *Centered* > 10 maka terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi, dan jika nilai VIF *Centered* < 10

¹⁰⁰ Dian Christiani Kabasarang, Adi Setiawan, Bambang Susanto, *Uji Normalitas dengan menggunakan Statistik Jarque-Bera* (Yogyakarta: Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan, 2012), h. 39.

¹⁰¹ Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis.....*, h. 61.

¹⁰² Sutrisni Hadi, *Metode Research.....*, h. 207.

maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen.¹⁰³

3) Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan aumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujhian yang sering dilakukan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b) Jika d terletak diantara dU dan $(4-dL)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak autokorelasi.
- c) Jika d terletak antara dL dan dU atau antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai d_u dan d_l dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.¹⁰⁴

¹⁰³ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* cetakan keenam (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 136.

¹⁰⁴ Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis.....*,h. 60.

4) Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dilakukannya uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana pada model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute* dengan variabel-variabel independen dalam model, guna mengetahui heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *White*.¹⁰⁵ Uji white dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen, kemudian ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen.

H_0 ditolak dan H_1 diterima, jika *chi-square* hitung lebih besar daripada nilai X^2 kritis atau ada heterokedastisitas.

H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika *chi-square* hitung lebih kecil dari X^2 kritis atau tidak ada heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono, analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik

¹⁰⁵*Ibid*, h. 63.

turunkan nilainya).¹⁰⁶ Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan model ekonometrika dengan meregrasikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*).¹⁰⁷ Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linier berganda. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Variabel Dependen (IPM Kota Metro).

a = Konstanta.

b = Koefisien Regresi.

X_1 = Variabel Independen (Pertumbuhan Ekonomi).

X_2 = Variabel Independen (Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan).

X_3 = Variabel Independen (pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan).¹⁰⁸

¹⁰⁶ Sigiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 277.

¹⁰⁷ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Ketiga* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 85.

¹⁰⁸ Asman Husaini dan Setiady, *Pengantar Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 247.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat (Y) dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif.¹⁰⁹

Koefisien determinasi, yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinan (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Nilai (R^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen.¹¹⁰

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji keberartian model regresi atau disebut dengan uji f, yaitu pengujian terhadap variabel *independen* secara bersama (simultan) yang ditujukan untuk mengetahui apakah semua variabel *independen* secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel *dependen*.¹¹¹

¹⁰⁹ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*..., h. 136.

¹¹⁰ Juliansah Noor, *Metodelogi Penelitian: skripsi, tesis, desertasi dan karya ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 162.

¹¹¹ Santoso S., *Statistik Parametrik* (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2000), h. 11.

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara keseluruhan terhadap variabel Y. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikansi dengan nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan keputusan dengan ketentuan:

- 1) Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_0 ditolak.
- 2) Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima.¹¹²

c. Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat,¹¹³ yang ditunjukkan oleh tabel *Coefficients*.¹¹⁴

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya dengan ketentuan:

- 1) Jika nilai $\text{Sig} < \alpha$ maka H_0 ditolak.
- 2) Jika nilai $\text{Sig} > \alpha$ maka H_0 diterima.¹¹⁵

¹¹² Juliansah Noor, *Metodelogi Penelitian: skripsi, tesis, desertasi dan karya ilmiah*...., h. 162.

¹¹³ Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*; Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis? Edisi 3 (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 238.

¹¹⁴ Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*...., h. 52.

¹¹⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi kedua, (Bandung RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 27.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Metro

Kota Metro adalah salah satu di Provinsi Lampung, berjarak 52 km dari Kota Bandar Lampung, merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota Metro merupakan kota yang memiliki tingkat kemacetan dan kriminalitas paling rendah di Provinsi Lampung. Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68,74 km², terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Metro Selatan : 14,33 km²
- b. Metro Barat : 11,28 km²
- c. Metro Timur : 11,78 km²
- d. Metro Pusat : 11,71 km²
- e. Metro Utara : 19,64 km²

Ibukota Kota Metro adalah Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Kota Metro sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi lima Kecamatan yang terdiri dari dua puluh dua Kelurahan. Kelurahan di Kota Metro diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu swakarya dan swasembada. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju

desa swasembada. Sedangkan desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Jumlah kelurahan yang diklasifikasikan sebagai swakarya berjumlah 16 sedangkan kelurahan yang diklasifikasikan sebagai swasembada berjumlah enam.

Tabel 4.1
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Klasifikasi
Desa di Kota Metro Tahun 2017

Kecamatan	Klasifikasi		Jumlah
	Swakarya	Swasembada	
Metro Selatan	3	1	4
Metro Barat	3	1	4
Metro Timur	3	2	5
Metro Pusat	4	1	5
Metro Utara	3	1	4
Jumlah	16	6	22

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro 2017

Topografi Kota Metro berupa daerah dataran aluvial. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m dari permukaan laut, dan dengan kemiringan 0% sampai 3%. Berdasarkan posisi geografisnya Kota Metro terletak antara $5^{\circ} 6'$ - $5^{\circ} 8'$ Lintang Selatan dan antara $105^{\circ} 17'$ – $105^{\circ} 19'$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.

Penduduk Kota Metro berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 162.976 jiwa yang terdiri atas 81.421 jiwa penduduk laki-laki dan 81.555 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,84. Kepadatan penduduk di Kota Metro tahun 2017 mencapai 2.371 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Metro Pusat dengan kepadatan sebesar 4.522 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Metro Selatan sebesar 1.063 jiwa/km². Sementara itu jumlah rumah tangga di Kota Metro sebanyak 41.741 rumah tangga.¹¹⁶

2. Sejarah Singkat Kota Metro

Pada jaman pemerintahan Belanda Kota Metro masih berupa hutan belantara yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban yang kemudian dibuka oleh para kolonisasi pada tahun 1936. Pada tahun 1937 resmi diserahkan oleh Marga Nuban dan sekaligus diresmikan sebagai Pusat Pemerintahan *Onder Districk* (setingkat kecamatan). Pada jaman pemerintahan Jepang, *onder districk* tetap diakui dengan nama *Sonco* (camat). Pada masa pelaksanaan koloniaisasi selain Metro juga terbentuk *onder ditrick* lain, yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung dan Trimurjo. Kelima *onder districk* ini mendapat rencana pengairan teknis bersumber dari Way Sekampung yang pelaksanaannya dilakukan oleh

¹¹⁶ Badan Pusat Statistik Kota Metro, Kota Metro Dalam Angka 2017, h. 7.

para kolonisasi-kolonisasi yang sudah bermukim di bedeng-bedeng dimulai dari bedeng satu bertempat di Trimurjo dan bedeng 62 di Sekampung, yang kemudian bedeng tersebut diberi nama bedeng 21 Yosodadi. Kota Metro memiliki sejarah yang cukup panjang dari jaman penjajahan sampai dengan saat ini, dimana sejarahnya dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

a. Jaman Belanda

Wilayah Kota Metro pada waktu jaman pemerintah Belanda (1937) merupakan onder districk Sukadana yang termasuk dalam Marga Nuban. Masing-masing onder districk dikapalai oleh seorang asisten Demang. Atasan distrik adalah *onder afdeling* yang dikepalai oleh seorang *Controleur* berkebangsaan Belanda.

b. Jaman Jepang

Pada jaman Jepang, *Residentre Lampoengsche Districten* diubah namanya menjadi Lampung *Syu*, yang dibagi menjadi tiga ken, yaitu:

- 1) Teluk Betung Ken
- 2) Metro Ken
- 3) Kotabumi Ken

Wilayah Kota Metro sekarang pada waktu itu termasuk Metro Ken yang terbagi dalam *gun*, *son*, marga-marga dan kampung-kampung.

c. Jaman Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, maka Metro Ken menjadi Kabupaten Lampung

Tengah termasuk Metro didalamnya. Berdasarkan ketetapan Residen Lampung No. 153/d/1952 tanggal 3 September 1952 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juli 1956 ditetapkan:

- 1) Menghapus daerah marga-marga dalam keresidenan Lampung
- 2) Menetapkan kesatuan-kesatuan daerah dalam keresidenan Lampung dengan nama “Negeri” sebanyak 36 Negeri.
- 3) Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik Negeri yang bersangkutan. Dihapuskannya pemerintah marga, dengan demikian maka sekaligus sebagai gantinya dibentuk Pemerintahan Negeri.

Akan tetapi pada tahun 1972 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung secara bertahap menghapus Pemerintahan Negeri, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintah Negeri beralih pada kecamatan setempat.¹¹⁷

B. Gambaran Hasil Penelitian

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas manusia, untuk melihat kualitas manusia dapat dilihat dari kehidupan yang layak, tingkat pendidikan yang tinggi dan tingkat kesehatan yang tinggi yang dapat dilihat dari fasilitas kesehatan yang lengkap. IPM merupakan indikator yang sangat penting karena apabila kualitas manusia itu tinggi maka produktivitas dan pendapatan meningkat dan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut disajikan dalam

¹¹⁷ *Ibid*, h. I.

bentuk Tabel Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017
(Dalam Persen %)

No	Tahun	IPM Metro
1	2007	75,31
2	2008	75,71
3	2009	75,98
4	2010	71,37
5	2011	72,23
6	2012	72,86
7	2013	74,27
8	2014	74,98
9	2015	75,10
10	2016	75,45
11	2017	75,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro 2017.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2010-2017, dimana pada tahun 2007-2009 masih menggunakan metode perhitungan lama. Akan tetapi walaupun masih menggunakan metode perhitungan lama IPM Kota Metro tahun 2007-2009 tetap mengalami peningkatan. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia di Kota Metro cukup baik.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Peran pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pembangunan manusia sangatlah penting, karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka indeks pembangunan manusia di suatu wilayah semakin tinggi.

Tabel 4.3
Pertumbuhan Ekonomi di Kota Metro Tahun 2007-2017
(Dalam Persen %)

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1	2007	6,24
2	2008	5,21
3	2009	5,32
4	2010	5,89
5	2011	6,04
6	2012	6,69
7	2013	6,77
8	2014	6,46
9	2015	6,85
10	2016	5,90
11	2017	5,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro 2017.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Metro sejak tahun 2007-2017 tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan naik turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Metro dari tahun 2007-2017 seperti yang terdapat dalam tabel 4.3 di atas.

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Belanja daerah menurut fungsi pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dari bidang pendidikan. Meningkatnya anggaran pendidikan serta pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja fungsi pendidikan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat. Belanja pendidikan ini diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut fungsi pendidikan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma

natural.¹¹⁸ Adapun total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kota Metro dari tahun tahun 2007-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Total Realisai Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
Kota Metro Tahun 2007 –2017 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Bidang Pendidikan
1	2007	86.285.614.336
2	2008	57.598.351.740
3	2009	90.082.386.505
4	2010	62.237.304.762
5	2011	181.812.218.071
6	2012	197.842.528.181
7	2013	209.415.500.000
8	2014	237.037.700.000
9	2015	261.765.000.000
10	2016	241.897.745.171
11	2017	196.918.658.950

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda Kota Metro 2017.

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Belanja daerah menurut fungsi kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dari bidang kesehatan. Meningkatnya anggaran kesehatan serta pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja fungsi kesehatan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya tingkat kesehatan masyarakat.. Belanja kesehatan ini diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut fungsi kesehatan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural. Adapun total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang kesehatan Kota Metro dari tahun tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

¹¹⁸ Ibid, h. 267.

Tabel 4.5
Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
Kota Metro Tahun 2007-2017 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Bidang Kesehatan
1	2007	54.296.163.077,00
2	2008	46.361.470.759,00
3	2009	39.805.435.284,00
4	2010	44.984.543.090,00
5	2011	63.402.381.572,00
6	2012	72.694.956.965,00
7	2013	68.047.977.197,00
8	2014	81.129.576.145,00
9	2015	155.521.066.453,00
10	2016	194.501.207.669,05
11	2017	208.743.695.164,00

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda Kota Metro 2017.

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak, maka di lakukan uji Jarque-Bera.

Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi dengan normal, jika signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi secara normal. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera

Sampel	Jarque-Bera	Signifikansi	Keterangan
33	1,328791	0,514584	Diterima

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2019.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan model *Jarque-Bera* menunjukkan angka sebesar 1,328791 dan nilai signifikansi yang ditunjukkan sebesar 0,514584. Untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi. Dari tabel uji normalitas di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,514584, nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya bahwa data variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, berasal dari data yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi multikolinieritas maka penelitian yang dilakukan di haruskan meneliti ulang bagaimana bentuk variabel dependennya. Alat statistik yang digunakan dalam menguji multikolinieritas adalah dengan *Variance Inflation factor* (VIF) *Centered*, dan standar nilai yang digunakan untuk menguji multikolinieritas adalah apabila VIF *Centered* lebih besar 10 maka dapat dikatakan asumsi model tersebut

mengandung multikolinieritas begitu sebaliknya, apabila VIF *Centered* lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas VIF *Centered*.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Centered</i> VIF	Keterangan
PEK	2,205781	Tidak terjadi Multikolinieritas
PPSP	4,552051	Tidak terjadi Multikolinieritas
PPSK	2,799778	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2019.

Hasil uji multikolinieritas yang terdapat pada tabel 4.7 diketahui bahwa nilai *tolerance* atau VIF (*Variance Inflation Factor*) *Centered* penelitian ini menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintan Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Nilai VIF *Centered* dari variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,205781, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan sebesar 4,552051, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan sebesar 2,799778, nilai tersebut lebih kecil dari 10 maka dapat dikatakan bahwa model asumsi tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara anggota serangkai observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan

pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Dapat dilihat dari angka

Prob. Chi-Square dari hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Sampel	Signifikansi	keterangan
33	0,1854	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2019.

Hasil dari uji autokorelasi yang terdapat pada tabel 4.8 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,1854, dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengandung masalah autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedistitas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menguji heteroskedastisitas adalah uji *White*. Dasar pengambilan keputusan hasil pengujian dengan membandingkan nilai signifikansi variabel independen dengan nilai kepercayaan ($\alpha = 0,05/5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari nilai ($\alpha = 0,05/5\%$), maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas.

Tabel 4.9
Uji Heterokedastisitas
(Uji White)

Heteroskedasticity Test: Uji White	
Prob. Chi-Square	0,3046

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2019.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada tabel 4.9 hasilnya menyatakan bahwa nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,3046, dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

2. Analisis linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) dengan variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan).

Dengan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Hasil analisis regresi linier ditujukan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Prediksi	Coefficient	t-statistic	Signifikansi	Kesimpulan
C		50,78545	1,927080	1,927080	
PEK	positif	-1,287057	-0,942914	0,3771	ditolak
PPSP	positif	0,848220	0,190858	0,8541	ditolak
PPSK	positif	2,023045	0,621625	0,5539	ditolak
$F_{Hitung} = 0,530282$					
Signifikansi = 1,927080					
Adjusted R-squared = 0,362512					
R-Square = 0,256241					

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2019.

Berdasarkan hasil output Eviews 8 di atas, diperoleh persamaan regresi Linier berganda sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 50,78545 - 1,287057 \text{ PEK} + 0,848220 \text{ PPSP} + 2,023045 \text{ PPSK} + e$$

Dimana:

a = konstanta (50,78545)

$b_1 = -1.287057$ $X_1 = \text{Pertumbuhan Ekonomi}$

$b_2 = 0.842220$ $X_2 = \text{Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan}$

$b_3 = 2.023045$ $X_3 = \text{Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan}$

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan nilai *Adjusted R²* untuk mengetahui model regresi manakah yang cocok dan baik untuk digunakan. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi R^2 diperoleh nilai sebesar 0,362512 atau 36,25%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor

Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yakni sebesar 0,362512 atau 36,25% sisanya 63,75% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan Dari hasil uji hipotesis secara simultan pada tabel 4.10 diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 0,530282 dengan nilai signifikan $1,927080 > 0,05$ (5%), sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan secara bersamaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Metro.

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial dilakukan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat keabsahan $\alpha = 0,05$ (5%). Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ (5%). Berikut hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji t pada tabel 4.10 di atas untuk variabel pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan nilai koefisien regresi dari pertumbuhan ekonomi bernilai negatif yakni sebesar -1,287057, dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5% yaitu 0,3771. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama dari variabel Pertumbuhan Ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ditolak.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Hasil uji t pada tabel 4.10 di atas untuk variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan nilai koefisien dari Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan bernilai positif yakni sebesar 0,848220, sedangkan nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,8541. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua dari variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan yang menyatakan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ditolak.

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Hasil uji t pada tabel 4.10 di atas untuk variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap IPM, menunjukkan bahwa

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan nilai koefisien dari Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan bernilai positif yakni sebesar 2,023045, sedangkan nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,5539. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga dari variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan yang menyatakan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ditolak.

D. Pembahasan

1. Pangaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro tahun 2007-2017

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di atas dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan sebesar -1,287057. Hal ini berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 1%, maka akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro sebesar 1,287057%.

Pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Namun jika pertumbuhan ekonomi lebih mengedepankan indikator lainnya, maka akan lebih sulit untuk meratakan pendapatan ekonomi di suatu daerah.

Menurut Todaro dan Smith ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berupa tanah (lahan), peralatan, dan sumber daya manusia (*human resource*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang ditabung lalu kemudian dapat diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dimasa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi dan fasilitas komunikasi demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga akhirnya akan membawa dampak yang menguntungkan terhadap produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat pertumbuhan manusia yang terus bertambah. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih ditingkatkan dan diperhatikan.
- b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja, sedangkan semakin banyak penduduk dan meningkatnya potensi dasar domestiknya.
- c. Kemajuan Teknologi. Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi diantaranya:

- 1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- 2) Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Metro dari tahun 2007-2017 mengalami fluktuasi seperti yang terdapat dalam tabel 4.3. Berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, karena semakin rendahnya pendapatan nasional atau daerah maka semakin rendah pula harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang dapat menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita yang tumbuh secara positif dan berarti. Namun jika pendapatan perkapita rendah maka akan lebih sulit dalam penyerapan tenaga kerja baru, dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro pada tahun 2007-2017 tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun pertumbuhan ekonomi di Kota Metro mengalami peningkatan dan penurunan. Hal tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Metro tidak merata karena hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut tidak ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia melainkan untuk kepentingan yang lain,

misalnya infrastruktur yang dimana infrastruktur itu terdiri dari beberapa subsektor seperti perumahan dan transportasi.

Berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi di Kota Metro mempengaruhi hasil dari penelitian ini, sehingga tidak sejalan dengan teori yang telah berkembang selama ini. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stephen G. Grubaugh, Asmita, Fitrawaty dan Dede Ruslan yang mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di Kota Metro yang mana memiliki pertumbuhan ekonomi tidak stabil, yaitu terjadi fluktuasi.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro tahun 2007-2017

Agar suatu negara/daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka masyarakatnya harus memiliki tingkat pendidikan yang baik. Di sini pemerintah memiliki peran yang penting dalam menyediakan fasilitas baik sarana dan prasarana yang menunjang sehingga sumber daya-sumber daya manusianya bisa mendapat pendidikan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro. Dari persamaan diketahui variabel kemiskinan menunjukkan koefisien sebesar 0,848220, jika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 1% maka akan

menaikkan atau menurunkan IPM sebesar 0,848220% artinya setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan menaikkan persentase IPM di Kota Metro. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Metro belum memfokuskan pengeluaran di sektor pendidikan untuk dapat mendongkrak IPM, melainkan pengeluaran disektor pendidikan diupayakan untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Metro untuk berbagai jenjang Pendidikan yang lebih baik lagi. Selain itu kebijakan pemerintah melalui program Pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi dan terutama bagi yang kurang mampu.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Safitri dan Sal Diba Susen Pake dkk, yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Oleh karena itu pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang didukung oleh jalur lalu lintas yang baik agar masyarakatnya bisa mendapatkan pendidikan yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Alokasi anggaran pengeluaran terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pemerintah telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari total belanja daerah untuk

bidang pendidikan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan terealisasi dengan baik hal ini terlihat karena lebih 20% dari total belanja daerah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro tahun 2007-2017

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro. Dari persamaan diketahui variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan menunjukkan koefisien sebesar 2,023045 artinya jika terjadi kenaikan/penurunan pada Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan sebesar 1% maka akan mempengaruhi naik/turunnya IPM sebesar 2,023045% artinya setiap peningkatan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan maka akan mempengaruhi persentase IPM di Kota Metro. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat desa di beberapa kecamatan di Kota Metro yang berstatus swakarya, sehingga masyarakatnya masih kesulitan dalam mengakses sarana kesehatan yang dibutuhkan dan masih kurangnya

penggunaan teknologi. Sehingga kesadaran masyarakatnya terhadap kesehatan masih tergolong kurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meylina Astri, Sri Indah Nikensari dan Harya Kuncara W., dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia.

Todaro & Smith mengatakan bahwa, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dalam keadaan tubuh yang sehat masyarakat bisa belajar dan bekerja, sehingga dapat meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang akan mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro tahun 2007-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Pengeluaran Pemerintah Sektor

Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Islam sebagai agama yang mengutamakan ilmu dan amal (kerja) merupakan dasar seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, sehingga dalam hal ini Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal/pekerjaan yang telah dilakukan.

Kesejahteraan dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dari pembangunan disuatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Namun perlu diingat juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan masyarakat juga akan tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan *ukhrawi*. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbalakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi islam.¹¹⁹

¹¹⁹ Irfan Syauqi Beik dan laily Dwi Arsyinta, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah....*, h. 207.

Jadi, pertumbuhan ekonomi harus mencakup kesejahteraan dunia maupun akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوهُم مِّنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

Artinya: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."*¹²⁰

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa manusia lebih mementingkan kesejahteraan di dunia tanpa mengkhawatirkan kesejahteraan di akhirat kelak, yang mana kesejahteraan di akhirat adalah kesejahteraan yang kekal. Dan diberitahukan pula bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat adalah dengan cara bertaqwa kepada Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan dalam Islam tidak hanya sebatas pembangunan untuk infrastruktur tetapi pembangunan secara moral dan spiritual masyarakatnya. Dan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang kemudian direalisasikan melalui keuangan publik. Dan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik maka pemerintah harus dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja dengan seoptimal mungkin. Dalam pandangan Islam, untuk mencapai suatu kesejahteraan atau *falah* tugas pemerintah adalah harus dapat menjamin kepentingan sosial

¹²⁰ Al- Kalam Digital..., h. 78.

masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya serta tugas pemerintah sebagai lembaga formal adalah mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya.

Dalam islam juga dijelaskan bahwa kedudukan manusia dimuka bumi ini sebagai khalifah utusan Allah SWT. Allah mengutus manusia untuk memimpin bumi dan Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna dari pada makhluk lain. Manusia diberi akal dan juga nafsu. Seperti dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ

Artinya: *“Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah ** di bumi.”*¹²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Sehingga kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting karena Allah mengutus manusia untuk mensejahterakan kehidupan di bumi. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembangunan manusia yaitu tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat atau kesejahteraan (*falah*). Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut yaitu dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia dan menuntut manusia untuk lebih bermoral.

Dalam ekonomi islam, peran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan sangatlah penting yang memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Dan pemerintah diharapkan bisa

¹²¹ Ibid, h. 6.

mengalokasikan dana dari anggaran dua sektor tersebut sebagaimana mestinya. Karena baik dalam konvensional ataupun dalam Islam, dilarang untuk memakan harta yang bukan haknya dan pemerintahlah yang diberi amanah untuk mengurus dan memegang harta tersebut. Yang berarti harta tersebut adalah milik masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk kemaslahatan bersama.

Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadillah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "...Allah akan Mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas menjelaskan bahwa ilmu sangatlah penting dalam kehidupan dan Allah akan meninggikan derajat hambanya yang berilmu beberapa derajat. Peran pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan IPM melalui pembangunan SDM tentunya dimulai dari sektor pendidikan, pendidikan dalam konsep Islam menjadi sumber atau dasar pokok.

Oleh sebab itu pendidikan sangatlah penting bagi semua masyarakat dan harus menjadi hal utama karena diwajibkan oleh agama. Ilmu menjadi pondasi awal manusia dalam menjalankan kehidupan, dengan adanya ilmu pengetahuan manusia bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dan terhindar dari kesulitan.

Akan tetapi dalam menuntut ilmu diperlukan kesehatan yang baik, oleh karena itu kesehatan juga merupakan hal yang penting dalam Islam,

sebagaimana dalam mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) yang mencakup pemenuhan lima tujuan dasar kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jiwa yang sehat serta jasmani yang sehat penting untuk selalu diutamakan, karena untuk beraktifitas sehari-hari manusia harus dalam keadaan yang sehat. Jika memiliki fisik yang sehat maka masyarakat dapat menuntut ilmu dan dapat maksimal dalam melakukan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, yang pastinya didukung dengan sarana ataupun prasarana yang disediakan oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa terjadinya fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Metro tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro belum terfokuskan pada peningkatan kualitas manusia melainkan pada infrastruktur. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dalam islam tidak hanya mendapatkan kesejahteraan di dunia akan tetapi mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik, Islam juga memandang pendidikan dan kesehatan adalah dua hal penting yang saling terkait. Karena melalui pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas manusia suatu daerah, dan pemerintah sebagai wakil masyarakat yang memegang amanah dalam

menyalurkan anggaran diharapkan dapat menempatkan anggaran tersebut dengan tepat agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini menyatakan tidak adanya pengaruh karena apabila pertumbuhan ekonomi bersifat negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia maka tidak mempengaruhi naik turunnya Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di Kota Metro mengalami fluktuasi dari tahun 2007-2017 dan Pertumbuhan ekonomi di Kota Metro tidak difokuskan untuk meningkatkan IPM.
2. Adanya pengaruh positif dan tidak signifikan pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal tersebut dikarenakan PPSP di Kota Metro difokuskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Metro.
3. Adanya pengaruh positif dan tidak signifikan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat desa di beberapa kecamatan yang berstatus desa swakarya sehingga kesadaran masyarakat akan kesehatan masih tergolong kurang.

4. Dalam perspektif ekonomi islam, pertumbuhan ekonomi bersifat multidimensi yang tidak hanya mementingkan kesejahteraan di dunia saja akan tetapi mencakup kesejahteraan di dunia dan akhirat. Peran pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan IPM melalui pembangunan SDM tentunya dimulai dari pendidikan karena sesuai dengan perintah yang Allah turunkan pertama kali yaitu “Bacalah”. Dan dalam islam sehat terdiri dari tiga pilar yaitu sehatnya pendengaran, penglihatan dan hati maka dengan begitu manusia dapat mendengar, melihat dan memahami kebenaran dan petunjuk yang dapat digunakan sebagai bekal untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Metro dan Dinas terkait dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memfokuskan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kualitas manusia, dan diharapkan untuk dapat meningkatkan belanja daerah disektor pendidikan dan kesehatan serta pengalokasian anggaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan dapat merata untuk setiap wilayah yang ada di Kota Metro.
2. Bagi masyarakat agar dapat mandiri dan terus berinovasi dalam melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan, dan menyadari akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga pentingnya

kesehatan untuk dapat terus memiliki fisik yang sehat sehingga dapat melakukan aktifitas lebih maksimal.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya untuk terus menggali topik lebih luas lagi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan membaca penelitian terdahulu sebagai bahan referensi lain karena dalam penelitian ini masih memiliki kekurangan. Dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas lainnya sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Abdul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam*, Malaysia: Pelanduk Pulication, 1991.
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Adi Widodo, Waridin dan Johanna Maria K, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Dinamika Pembangunan Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, Juli 2011,
- Adriyan Sutawijaya, Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonsia Tahun 1980-2006, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 6 No. 1, Maret 2010.
- Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis* cetakan pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Al-Asy Ari Adnan Hakimet all, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konfrensi Islam (OKI), *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.1, Juni 2017.
- Alvi, Safiq A., dan Amer Al-Raubae, "Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan dalam Persepsi Islam" *Islamia* II, no. 5, 2005
- Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* cetakan keenam, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Asman Husaini dan Setiady, *Pengantar Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Asmita et all, Analysis of Factor affecting the Human Development Index in North Sumatra Province, *Journal of Business and Management* ISSN: 2319-7668, Vol.19, Issue.10, Ver.VII, Oktober 2017.
- Badan Pusat Statistik, Tinjauan Ekonomi Regional Daerah Otonom di Provinsi Lampung 2014, 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro, 2019.
- Cliff Laisina, Vecky Masinambow, Wensy Rompas, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-2013, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 15 No. 04, 2015.

- Denni Sulistio Mirza, Pengaruh Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 1 November 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia, 2011.
- Diah Pradnyadewi T, Ida Bagus Putu Purbadharmaja, Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali, *Jurnal Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.4 No. 2, 2 Februari 2017.
- Dian Christiani Kabasarang, Adi Setiawan, Bambang Susanto, *Uji Normalitas dengan menggunakan Statistik Jarque-Bera*, Yogyakarta: Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan, 2012.
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Fhina Andrea Christy at al, " Hubungan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia", *The 3rd National Conference UKWMS*, Surabaya 10 Oktober 2009.
- Hartono, *Metodelogi Penelitian*, Pekanbaru: Zanava Publishing, 2010.
- Hasan Andy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Human Development Report, United National Development Programme (UNDP)*, New York Oxford University Press, 1995.
- Husein Umar, *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa untuk Melakukan Riset dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*, cetakan kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Intan Safitri, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No.1, 2016.
- Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Irawan, M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* edisi keenam, Yogyakarta: BPFE, 2002
- Irfan Syauqi Beik dan Laily dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Juliansah Noor, *Metodelogi Penelitian: skripsi, tesis, desertasi dan karya ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Katalog Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010.
- Khurshid Ahmad, “Economic Development in an Islamic Framework” dalam *Studies Islamic Economics*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976
- Kuncoro Mudjarat, Ph.D, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi* Cetakan kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015.
- Lincolyn Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010.
- Maria Johanna, “Analisis Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Pembangunan Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1.
- Maya Masita Septiarini, dan Sri Herianingrum, Analisis I-HDI (*Islamic Human Development Index*) di Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.4 No. 5, Mei 2017.
- MB Hendrie Anto, *Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries, Islamic Economic Stidies*, Vol. 19 No.2, 2009.
- Mega Castrenaningtyas, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur; studi kasus Kawasan Gerbang Kertosusila dan Wilayah Tapal Kuda, Skripsi, Program Sarjana Departement Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.
- Meier, dalam Winarti, A, *Analisis Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014.
- Merang Kahang et all, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 18 No. 2, 2016.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonmi*, Jakarta, 2011.
- M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT RajaWali Pers Persada, 2014.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*; Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis? Edisi 3, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi kedua, Bandung Raja Grafindo Persada, 2010.

- Novita Dewi, Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, *Jom Fekon*, Vol. 4 No. 1, Februari 2017.
- Nurul Huda et al, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta, Pranada Media Group, 2005.
- P3EI Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Paul A Samuelson dan William, dkk, *Makroekonomi* Edisi 14, Erlangga, 1992.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rina Sukarman, Taufik Marwa, Tajuddin Husin, Belanja Pemerintah dan Kemiskinan, *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol. 10 No. 1, April 2016.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah dan Dasar Kebijakan* (ed. 2) cetakan ke-8, 2017.
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sal Diba Susen Pake dkk, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM di Kabupaten Halmahera Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18, o. 04, 2018.
- Santoso S., *Statistik Parametrik*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2000.
- Seokidjo Notoatmojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ. Siwu, 2015, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 15 no. 02 - Edisi Juli.
- Sri Indah Nikensari et al, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Bisnis*, Vol.1, No.1, Maret 2013.
- Stephen G.Brubaugh, Economic Growth and Growth In Human Development, *Applied Econometrics and International Development*, Vol.15 No. 2, 2015.
- Suharmis Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sutrisni Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Tri Yuniarti Rusandi, *Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam*

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung 2014.

Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia* cetakan pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Cetakan Pertama Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2015.

Winarti A., *Analisis Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014.

Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Ketiga*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011.

Yusuf Qhardawi, *Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah*, Cet II Bairut Libanon, terjemahan Didin Hafifudin, 1408H/1998.





- a. Kecamatan Metro Selatan: Summersari, Rejomulyo, Margodadi, Margorejo.
- b. Kecamatan Metro Barat: Mulyojati, Mulyosari, Ganjaragung, Ganjarasri.
- c. Kecamatan Metro Timur: Tejosari, Tejoagung, Iringmulyo, Yosorejo, Yosodadi.
- d. Kecamatan Metro Pusat: Metro, Imopuro, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, Yosomulyo.
- e. Kecamatan Metro Utara: Banjarsari, Purwosari, Purwoasri, Karangrejo.

